

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan. Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif.

Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal ini diharapkan oleh masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, karena pada dasarnya uang yang dikelola pemerintah itu bersumber dari rakyat sendiri, sehingga wajar jika masyarakat menginginkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, dengan adanya transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah menjadikan

masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung tentang tata kelola keuangan di pemerintahan daerah.

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess dalam Ridha dan Basuki, 2012). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz dalam Ridha dan Basuki, 2012) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver dalam Ridha dan Basuki, 2012).

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (perda) yang mengatur khusus mengenai transparansi. Di Indonesia, setidaknya terdapat 12 kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat. Beberapa kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang transparansi diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit

untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (radarbanten.com).

Menurut Ridha dan Basuki (2012), transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Saat ini masih belum banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan yang didorong oleh adanya tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Ridha dan Basuki (2012), tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh

legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini di khususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Menurut Ridha dan Basuki (2012), ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen manajemen yang dimaksud yaitu terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Menurut Ridha dan Basuki (2012), integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan. Sistem manajemen yang baik akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD-SKPD.

Menurut Indriasari dan Naharto (2008), kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laporan keuangan daerah (LKD) yang berkualitas. Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambah satu variabel independen, yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia. Peneliti ingin menguji apakah hasil dari penelitian ini akan tetap signifikan jika ditambah satu variabel independen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?

4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik, khususnya organisasi pemerintah.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi homogenitas penerapan kebijakan transparansi pelaporan keuangan.
 - d. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap faktor-faktor penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi Kepala Daerah guna memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kebijakannya di masa yang akan datang.
2. Teoritis:
- a. Memberi bukti empiris mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
 - b. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.